

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan *Good gvernance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Proses tersebut merupakan siklus logistic yang terperinci berdasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam kondeks yang lebih luas tentang keuangan negara (Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor. 8 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, salah satu dinas yang terkait dari pengelolaan Barang Milik Daerah (Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006).

The Liang Gie mengungkapkan bahwa Arsip yaitu suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Pembangunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian internal dari pembangunan nasional perlu dilakukan secara terencana dan terpadu agar dapat dilakukan secara optimal, efektif, efisien serta tepat sasaran. (The Liang Gie, 2010).

Masalah dalam bidang alat transportasi seperti mobil, motor, bus keliling didalam Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau hanya ada 10 alat transportasi kendaraan supaya lebih idealnya harus dapat mempunyai 15 kendaraan alat transportasi agar pelayanan atas masyarakat dapat terpenuhi dengan pelayanan yang sangat baik diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. serta alokasi jumlah anggaran yang kecil untuk menunjang kesejahteraan bagi para pengelola kearsipan dengan berkisaran antara 1milyar seharusnya alokasi jumlah anggaran tersebut terlalu sedikit seharusnya pemerintah mengalokasi dana pada dinas tersebut sebesar 2 milyar karena Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Riau sudah menjadi salah satu perpustakaan yang terbesar di Indonesia dengan begitu sanga pesat perkembangan pada dinas tersebut. (PERGUB Nomor 83 tahun 2016).

Karena keterkaitannya dengan pengelolaan keuangan terlihat dari hal-hal yang berhubungan tentang keuangan misalkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan

hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan. Jadi arsip itu sebagian dari barang milik daerah karena itu sangat perlu mengetahui alokasi dana yang diberikan pemerintah anggarannya sebesar berapa yang harus di alokasikan dan apa saja yang penting diperlukan oleh dinas tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau”**



1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam proses pengelolaan barang milik daerah tidak akan luput dari permasalahan, berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau terhadap bentuk pengorganisasian yang baik.
2. Bagaimana asumsi masyarakat terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau?

1.3 TUJUAN MAGANG

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau terhadap bentuk pengorganisasian yang baik.
2. Untuk memahami asumsi dari masyarakat terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau.

1.4 MANFAAT MAGANG

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
 - b. Sebagai proses awal mengaplikasikan teori-teori yang didapat di perkuliahan ke praktek kerja sesungguhnya.
 - c. Sebagai latihan terhadap berbagai keadaan ataupun permasalahan di dunia kerja.

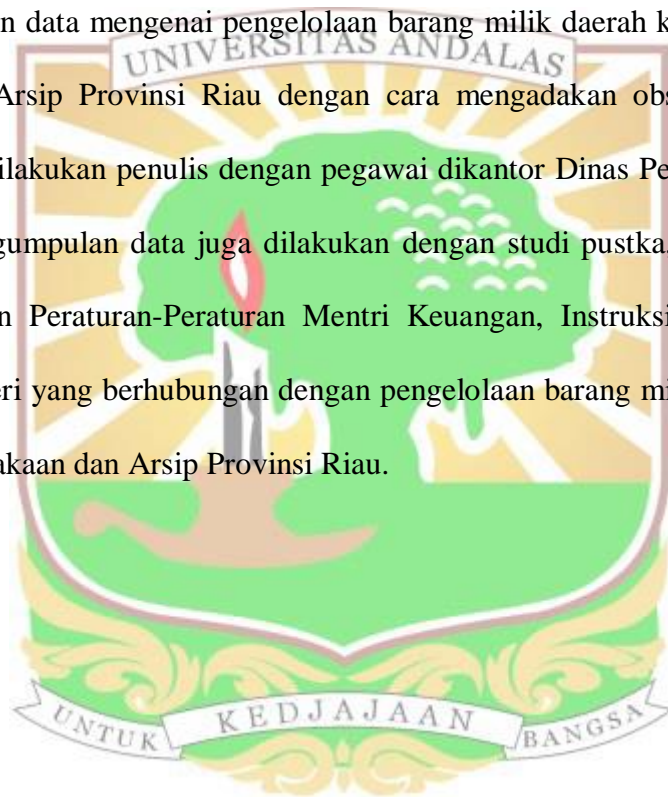
2. Bagi Pembaca

Penulisan laporan ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau.

1.5 METODE PENULISAN

Data dan Sumber Data

Pengumpulan data mengenai pengelolaan barang milik daerah khususnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau dengan cara mengadakan observasi langsung dan wafwancara yang dilakukan penulis dengan pegawai dikantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustka, yaitu data diperoleh dari buku-buku dan Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah khususnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau.



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, rencana kegiatan magang, metodologi penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam menyelesaikan laporan magang.

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisi gambaran kantor dinas perpustakaan dan arsip provinsi riau, meliputi sejarah ringkas, visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas tentang bagaimana pengaruh pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, dan terhadap asumsi dari masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan seluruh pembahasan serta pemberian saran yang mungkin akan berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan nantinya